



Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia

Febriana Tri Wulandari*, & Hayati Zakaria

Program Doktoral Pertanian Berkelanjutan, Universitas Mataram, Jl. Pendidikan No. 37, Mataram, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: febriana.wulandari@unram.ac.id

Abstrak

Kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, persoalan yang mendasar adalah fragmentasi kebijakan dan lemahnya efektivitas implementasi di tingkat lokal, sehingga banyak program tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa. Kajian literatur sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek teknis peningkatan produksi atau ketahanan pangan, tetapi masih terbatas dalam mengulaskan keterpaduan kebijakan antar sektor serta sinerginya dengan konteks sosial-ekonomi pedesaan. Untuk itu, studi ini mengisi gap literatur dengan menganalisis arah kebijakan terkini melalui pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian pustaka, dengan menekankan pada tiga pilar utama: keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan teknologi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pertanian saat ini berfokus pada peningkatan produksi, diversifikasi komoditas, perlindungan lahan, dan adopsi teknologi digital. Sementara itu, kebijakan pedesaan mengedepankan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan optimalisasi potensi desa. Tantangan besar yang masih dihadapi meliputi alih fungsi lahan, regenerasi petani yang minim, dan kesenjangan akses teknologi. Studi kasus di berbagai daerah membuktikan bahwa integrasi kebijakan yang adaptif dan partisipatif mampu meningkatkan produktivitas, menekan angka kemiskinan, dan memperkuat ekonomi desa. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan petani, transformasi agribisnis berbasis kawasan, serta peningkatan literasi digital pertanian. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan ini dapat menjadi acuan untuk merancang strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Kebijakan Pertanian; Pembangunan Pedesaan; Efektivitas Kebijakan; Pemberdayaan.

Agricultural and Rural Development Policies in Indonesia

Abstract

Agricultural and rural development policies in Indonesia play a strategic role in addressing the challenges of food security, community welfare, and environmental sustainability. However, fundamental issues are policy fragmentation and weak implementation effectiveness at the local level, resulting in many programs not fully addressing the needs of rural communities. Previous literature reviews have focused primarily on the technical aspects of increasing production or food security, but have been limited in examining the integration of policies across sectors and their synergy with the rural socio-economic context. Therefore, this study fills this gap in the literature by analyzing current policy directions using a qualitative descriptive approach based on a literature review, emphasizing three main pillars: sustainability, community empowerment, and technology development. The results indicate that current agricultural policies focus on increasing production, diversifying commodities, protecting land, and adopting digital technology. Meanwhile, rural policies prioritize infrastructure development, empowering local economies, and optimizing village potential. Major challenges still faced include land conversion, limited farmer regeneration, and disparities in access to technology. Case studies from various regions demonstrate that adaptive and participatory policy integration can increase productivity, reduce poverty, and strengthen village economies. Practically, these findings underscore the importance of strengthening farmer institutions, transforming area-based agribusiness, and improving digital agricultural literacy. Therefore, these policy recommendations can serve as a reference for designing more inclusive, effective, and sustainable agricultural and rural development strategies in Indonesia.

Keywords: Agricultural Policy; Rural Development; Policy Effectiveness; Empowerment.

How to Cite: Wulandari, F. T., & Zakaria, H. (2025). Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia. *Empiricism Journal*, 6(3), 1281–1294. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.2941>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.2941>

Copyright© 2025, Wulandari & Zakaria
This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam pembangunan ekonomi nasional sejak awal kemerdekaan. Sebagai sektor yang menyerap sebagian besar tenaga kerja, khususnya di pedesaan, pertanian memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung

perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, sektor ini menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk menurunnya jumlah petani, krisis iklim yang berdampak pada hasil pertanian, serta ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur yang terbatas di daerah pedesaan (Bappenas, 2021; FAO, 2020).

Kebijakan pertanian memainkan peran penting dalam membentuk pembangunan sektor pertanian, mengatasi tantangan ekonomi, lingkungan, dan sosial (Nasution *et.al*, 2023). Selama ini persoalan kebijakan pertanian di Indonesia setidaknya dilihat dalam dua perspektif, pertama ketersediaan lahan pertanian (Swastika *et al.*, 2016) dan ketersedian produk pertanian atau lebih dikenal sebagai ketahanan pangan (Pakpahan, 2018). Kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia selama lima tahun terakhir telah diarahkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan fokus utama pada pencapaian ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan peningkatan kualitas hidup petani serta masyarakat desa. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program, seperti Program Pembangunan Pertanian Berkelanjutan yang mengutamakan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan berbasis sumber daya lokal, serta Program Desa Mandiri Pangan yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di desa-desa (Kementerian Pertanian, 2022). Program-program ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan pedesaan.

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan, mulai dari penyempitan lahan akibat pertumbuhan penduduk (Janah, 2017), ekspansi ruang kota yang tidak terkendali (Nurrokhman, 2019), hingga alih fungsi lahan dan menurunnya tenaga kerja pertanian (Susilowati, 2016). Sementara itu, beberapa negara telah berhasil mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani (Chavas & Nauges, 2020). Pemanfaatan teknologi terbukti mampu menjawab persoalan sekaligus memperkuat pembangunan pertanian berkelanjutan (Li *et al.*, 2020). Namun di Indonesia, tingkat adopsi teknologi pertanian dinilai masih rendah (Rusdiana & Maesya, 2018). Gap penelitian yang muncul adalah belum adanya kajian komprehensif yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan lintas sektoral berbasis smart farming dan digitalisasi pertanian dalam konteks lokal, khususnya wilayah pedesaan yang rentan terhadap alih fungsi lahan dan minim regenerasi petani. Kajian ini membatasi ruang lingkup analisis pada tiga indikator utama, yaitu: keberlanjutan, yang mencakup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta praktik ramah lingkungan (Dayanti & Soetjipto, 2024); pemberdayaan masyarakat, melalui penguatan kelompok tani, partisipasi petani muda, dan akses pelatihan kewirausahaan (Syahyuti, 2021; Hidayat *et al.*, 2024); serta pengembangan teknologi, termasuk penerapan smart farming, digitalisasi rantai pasok, dan inovasi berbasis sumber daya lokal (Purwanto & Sari, 2022; Rahmanul *et al.*, 2023). Fokus evaluasi ini ditujukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pertanian dan pedesaan mampu menjawab tantangan nyata sekaligus mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Sidharta *et al.* (2021), penguatan sektor pertanian melalui modernisasi teknologi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing petani di tengah dinamika global. Mereka juga menyoroti pentingnya regenerasi petani muda sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan sektor agraris di masa depan dimana keluarga sebagai faktor internal memiliki peran penting dalam mendukung regenerasi petani, terutama dalam membangun minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Program pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan mampu meningkatkan pendapatan petani muda hingga rata-rata 21% per tahun, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di komunitas pedesaan. Beberapa penelitian terkait peran petani muda dalam pengembangan pertanian ; penelitian Syahyuti (2021), potensi petani muda dalam penerapan teknologi pertanian digital dan smart farming ; Nugroho, R. A., & Sutrisno, J. (2020), otivasi dan Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Pertanian: Studi pada Petani Milenial di Kabupaten Sleman.; Wahyuni, S., & Rahardjo, T. (2021), Peran Petani Muda dalam Penguatan Ketahanan Pangan Lokal Melalui Pertanian Organik. Tujuan review ini untuk menganalisis kebijakan pembangunan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan melalui identifikasi tantangan, usulan solusi, kerjasama pemangku kepentingan, serta praktik ramah lingkungan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik kajian literatur (*library research*). Data diperoleh dari artikel jurnal terindeks, buku akademik, laporan kebijakan, serta publikasi resmi pemerintah maupun lembaga internasional yang relevan dengan topik pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia. Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan basis data Google Scholar, Scopus, dan DOAJ, menggunakan kata kunci seperti “*kebijakan pertanian*”, “*pembangunan pedesaan*”, “*sustainability*”, “*empowerment*”, dan “*smart farming*”, dengan rentang waktu publikasi antara tahun 2015 hingga 2024.

Analisis data dilakukan melalui analisis konten dengan teknik *coding* tematik, di mana setiap literatur dikelompokkan ke dalam tiga tema utama, yaitu keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, serta kecenderungan arah kebijakan dari berbagai sumber yang ditelaah.

Tahapan penelitian ini diawali dengan identifikasi isu dan perumusan fokus kajian, dilanjutkan dengan pencarian serta seleksi literatur berdasarkan kriteria inklusi–eksklusi yang telah ditetapkan. Literatur yang terpilih kemudian dikategorikan sesuai tema kajian, dianalisis dengan teknik *coding* tematik dan komparatif, lalu disintesis dalam bentuk narasi akademik yang diperkuat dengan tabel ringkasan. Untuk memperjelas alur kerja, metodologi penelitian ini juga direpresentasikan melalui bagan (*flowchart*) yang menggambarkan hubungan antartahapan secara runtut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan

Pembangunan yaitu suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material spiritual serta berbagai bidang kehidupan masyarakat (Rosana, 2018). Kebijakan pertanian dapat didefinisikan sebagai serangkaian peraturan, strategi, dan tindakan yang dirancang untuk mendukung pembangunan sektor pertanian secara berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, melindungi sumber daya alam, serta mendorong inovasi teknologi dalam praktik pertanian (Parmila *et.al*, 2022). Menurut Djibrin & Mokoginta (2023), kebijakan pertanian adalah seperangkat strategi, peraturan, program, dan intervensi pemerintah yang bertujuan mengatur sektor pertanian agar mampu mencapai tujuan pembangunan seperti peningkatan produksi, ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Fauzi (2021), kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian, mempromosikan diversifikasi tanaman, dan mendukung praktik pertanian berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan untuk melindungi kesejahteraan para petani dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, masing-masing tentang Ketahanan Pangan serta tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam pernyataan Undang-Undang tersebut, produk-produk pertanian lokal harus diprioritaskan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan nasional, berlaku larangan impor komoditas pertanian disaat pasokan domestik dinilai mencukupi. Pernyataan Undang-Undang tersebut juga mengatur kewenangan pemerintah dalam menyediakan subsidi pupuk dan benih bagi petani, untuk menurunkan biaya petani dan mencapai tujuan swasembada pangan berkelanjutan (Patunru & Respatiadi, 2017).

Pendekatan kebijakan pertanian ini juga mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keberlanjutan ekonomi pedesaan dapat terjaga dengan baik (Arifin *et al.*, 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hasibuan dan Sari (2022) yang menunjukkan perlunya penguatan peran komunitas lokal dalam perencanaan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan. Kebijakan pedesaan, di sisi lain, dapat dipahami sebagai pendekatan yang lebih luas yang mencakup semua aktivitas dan program yang ditujukan untuk pembangunan wilayah pedesaan. Ini mencakup pengembangan ekonomi, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan umum lainnya. Kebijakan pedesaan sering kali beradaptasi dengan kebijakan pertanian,

mengingat keduanya saling berhubungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2023), pengembangan infrastruktur pedesaan yang baik sangat penting untuk memperlancar akses petani ke pasar dan meningkatkan distribusi produk pertanian, sehingga memberikan dampak positif terhadap penghasilan petani dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat beberapa fokus utama dalam kebijakan pertanian dan pedesaan saat ini sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan: Kebijakan saat ini sangat berorientasi pada peningkatan produksi pangan lokal untuk mencapai ketahanan pangan. Penelitian oleh Syaifulullah (2023) menunjukkan bahwa memperkuat ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada inovasi teknologi dan praktik pertanian yang berkelanjutan
2. Keberlanjutan Lingkungan: Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, banyak kebijakan kini lebih memperhatikan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Kemitraan antara pemerintah dan LSM di bidang pelestarian lingkungan serta pertanian berkelanjutan telah menjadi salah satu strategi yang efektif (Sakir, 2021). Penelitian Fitri & Usni (2024), penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan pengelolaan hama terpadu mampu meningkatkan produktivitas tanaman.
3. Pengembangan Ekonomi Lokal: Kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan akses petani ke pasar, partisipasi dalam rantai nilai, dan pengembangan usaha kecil dan menengah sangat penting untuk memperkuat perekonomian pedesaan. Penelitian oleh Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa dukungan terhadap usaha pertanian lokal dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan petani.
4. Diversifikasi Pertanian: kebijakan ini untuk meningkatkan ketahanan dan pendapatan petani dengan memperluas atau memvariasikan jenis komoditas yang dibudidayakan, baik dalam satu musim tanam maupun antar musim. Strategi ini mencakup perubahan dari sistem pertanian monokultur ke sistem yang lebih beragam dengan melibatkan berbagai jenis tanaman, ternak, dan kegiatan non-pertanian yang masih terkait sektor agribisnis (Susilowati et al., 2021). Penelitian Pratiwi (2021), menyatakan bahwa diversifikasi tanaman dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani.

Kebijakan pertanian dan pedesaan di Indonesia memainkan peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dari ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, hingga pengembangan ekonomi lokal, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian dan masyarakat pedesaan. Melalui penerapan kebijakan yang terintegrasi dan partisipatif, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk masyarakat pedesaan.

Sejarah Perkembangan Pertanian di Indonesia

1. Masa Prasejarah dan Tradisional

Pertanian di Indonesia telah berlangsung sejak zaman prasejarah, ketika manusia mulai hidup menetap dan mengembangkan pertanian berpindah atau shifting cultivation (Simanjuntak, 2019). Sistem ladang berpindah dengan alat sederhana seperti cangkul dari batu digunakan untuk mengolah lahan, yang menjadi dasar sistem pertanian awal di Nusantara (Bellwood, 2017). Budaya bercocok tanam menetap mulai berkembang sekitar 2500 SM, seiring migrasi masyarakat Austronesia ke wilayah kepulauan Indonesia dan domestikasi tanaman seperti padi, umbi-umbian, kelapa, dan pisang (Bellwood, 2017). Praktik pertanian ini sangat terikat dengan pola kepercayaan lokal dan nilai-nilai adat, yang diwariskan secara turun temurun (Simanjuntak, 2019).

2. Masa Kerajaan dan Kolonial

Pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, pertanian berkembang dengan pengelolaan irigasi yang lebih sistematis dan penggunaan teknologi lokal yang lebih canggih, seperti sistem subak di Bali dan irigasi sederhana di Jawa (Boomgaard, 2020). Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya mengelola pertanian padi dengan pengairan yang lebih terorganisir dan menjadi basis ekonomi kerajaan (Elson, 1997). Saat penjajahan Belanda, sistem pertanian komersial diperkenalkan melalui Cultuurstelsel (tanam paksa) pada 1830, yang memaksa petani menanam komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan tembakau untuk kepentingan kolonial (Boomgaard, 2020). Sistem ini menguntungkan Belanda tetapi menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di kalangan petani pribumi (Elson, 1997).

3. Masa Kemerdekaan Awal (1945–1966)

Setelah kemerdekaan, sektor pertanian menghadapi berbagai persoalan: kerusakan infrastruktur akibat perang, produktivitas rendah, dan lemahnya akses petani terhadap teknologi dan modal (World Bank, 2020). Pemerintah baru Indonesia lebih fokus pada penyediaan pangan, namun pertanian tetap bersifat tradisional dan subsisten (White, 2018). Distribusi hasil pertanian tidak merata, sementara kapasitas kelembagaan pertanian masih sangat terbatas, sehingga krisis pangan menjadi masalah utama pada masa ini (World Bank, 2020).

4. Masa Orde Baru (1966–1998)

Pemerintah Orde Baru memulai Revolusi Hijau untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya padi, melalui intensifikasi pertanian menggunakan benih unggul, pupuk kimia, dan pestisida (Barker et al., 2021). Program Bimas (Bimbingan Massal) dan Inmas (Intensifikasi Massal) menjadi strategi utama untuk meningkatkan produktivitas (Hall, 2020). Keberhasilan program ini ditandai dengan swasembada beras pada tahun 1984, namun juga menyebabkan degradasi lingkungan, ketergantungan terhadap input eksternal, serta hilangnya keanekaragaman varietas lokal (Barker et al., 2021; Hall, 2020).

5. Masa Reformasi (1998–sekarang)

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan besar, salah satunya adalah desentralisasi kewenangan pertanian ke daerah, sehingga kebijakan pertanian menjadi lebih variatif tergantung wilayah (Syahyuti, 2021). Fokus pemerintah bergeser pada ketahanan pangan, diversifikasi pertanian, dan pembangunan pertanian berkelanjutan (FAO, 2022). Namun tantangan besar tetap ada, seperti konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, rendahnya regenerasi petani, dan ketimpangan penguasaan lahan (White, 2018; MoA Indonesia, 2023). Berbagai program seperti KUR pertanian, Kartu Tani, dan revitalisasi penyuluh diluncurkan untuk mengatasi masalah ini (MoA Indonesia, 2023).

6. Masa Terkini: Pertanian Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan

Saat ini, arah kebijakan pertanian Indonesia ditujukan pada pengembangan smart farming, digitalisasi pertanian, dan pemanfaatan teknologi presisi (Purwanto & Sari, 2022). Pendekatan ini didukung dengan penguatan rantai pasok, e-commerce pertanian, serta penerapan praktik pertanian ramah lingkungan seperti agroekologi dan konservasi tanah (FAO, 2022; Badan Pangan Nasional, 2023). Di sisi lain, pertanian juga diarahkan untuk mendukung ketahanan iklim dan ekonomi sirkular, melalui pengurangan limbah dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan bakar alternatif atau pupuk organik (Badan Pangan Nasional, 2023).

Tujuan dan Sasaran Kebijakan Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Di Indonesia

Tujuan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan pangan, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi besar yang tergantung pada sektor agraris dan pedesaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Kebijakan pertanian bertujuan untuk mempertahankan produksi pertanian sekaligus mengurangi kemiskinan dan memenuhi kebutuhan sosial (Nasution et al., 2023). Kebijakan dirancang untuk menyeimbangkan efisiensi dengan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani dan kelompok lingkungan (Fulton, 2015).

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa reforma agraria, yang bertujuan memberikan akses yang adil terhadap tanah dan sumber daya agraria, dapat meningkatkan kesejahteraan petani (Triyuda et al., 2024; , Simanjuntak & Maulana, 2024), (Aurelio, 2023; . Dalam konteks ini, pemerintah berupaya untuk menata kembali struktur penguasaan dan hak atas tanah melalui kebijakan yang mendukung akses masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung, untuk menguasai sumber daya pertanian (Sopyan & Sidipurwany, 2024; , Sulistyaningsih, 2021). Reforma agraria menjadi landasan penting dalam upaya menciptakan keadilan sosial, di mana hak atas tanah

diharapkan dapat mengurangi ketimpangan dalam penguasaan sumber daya agraria (insani, 2023; , Ismail, 2012).

2. Ketahanan pangan

Ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang tepat dapat berkontribusi pada peningkatan produksi pertanian dan keberlanjutan sistem pertanian (Triyuda et al., 2024; , Simanjuntak & Maulana, 2024), Pancarani & Wahyuni, 2023). Dengan mengimplementasikan kebijakan redistribusi lahan dan memperkuat hak petani atas tanah, pemerintah dapat menciptakan situasi di mana masyarakat mampu memproduksi dan mengakses pangan secara berkelanjutan. Hal ini semakin penting mengingat meningkatnya permintaan pangan akibat pertumbuhan populasi yang pesat dan perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas pertanian (Aurelio, 2023; , Franata et al., 2024).

3. Pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Program berbasis masyarakat seperti Asset Based Community Development (ABCD) diperkenalkan untuk memberdayakan desa-desa dengan memanfaatkan potensi lokal (Ridhani & Priyadharma, 2023; , Cahasta, 2021). Strategi ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam sebagai basis dari keberlanjutan lingkungan pedesaan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan secara global untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Andari, 2021).

Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan menghadapi berbagai tantangan. Hambatan yang sering muncul termasuk konflik dalam penguasaan tanah, ketidakpastian hukum, serta rendahnya akses terhadap teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian (Ekasafitri, 2023; , Suroso, 2022; , Shani et al., 2024). Penelitian di beberapa wilayah menunjukkan ketidakmerataan pencapaian pembangunan yang dapat menghambat kemajuan di daerah-daerah tertentu (Listyawati et al., 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada, memastikan bahwa kebijakan tersebut menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang berbeda.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan kolaborasi antar sektor juga menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian dan pedesaan. Pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan (Sopyan & Sidipurny, 2024; Simanjuntak & Maulana, 2024). Dengan melibatkan beragam perspektif dan pengalaman, keberhasilan pembangunan pertanian dapat lebih terjamin, serta memperkuat daya saing sektor pertanian di tingkat regional maupun internasional. Secara keseluruhan, tujuan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia harus ditekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap lingkungan. Meskipun tantangan yang kompleks dapat menghambat proses ini, dengan upaya yang terencana dan partisipatif, diharapkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat dicapai.

Sasaran kebijakan pertanian bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan (Marita et al.,2021). Berikut beberapa sasaran utama yang sering menjadi fokus kebijakan di sektor pertanian:

1. Ketahanan Pangan: Memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat, termasuk menjaga harga pangan yang terjangkau.
2. Peningkatan Produktivitas: Meningkatkan hasil panen melalui adopsi teknologi, praktik pertanian yang efisien, dan penelitian agrikultur.
3. Kesejahteraan Petani: Melindungi pendapatan petani melalui subsidi, akses kredit, asuransi pertanian, dan kebijakan harga yang adil.
4. Diversifikasi Pertanian: Mendorong petani untuk tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman, melainkan mengembangkan berbagai jenis komoditas untuk mengurangi risiko ekonomi.

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam: Memastikan penggunaan lahan dan air secara efisien, melindungi kesuburan tanah, serta mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan.
6. Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan akses petani ke pasar dengan membangun jalan, gudang, dan fasilitas irigasi.

Permen Tentang Kebijakan Pertanian Dan Pedesaan Di Indonesia

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020
Tentang: Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian
Isi pokok: Mendorong pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan. Mendorong sinergi antara petani, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Fokus pada pendekatan agribisnis, kelembagaan petani, dan dukungan infrastruktur.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018
Tentang: Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Perdesaan Pertanian
Isi pokok: Menjadi acuan dalam menyusun rencana pengembangan kawasan pertanian di pedesaan. Mengatur keterpaduan antar sektor, pelibatan masyarakat, dan penguatan kelembagaan lokal.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020
Tentang: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
Isi pokok: Dana desa dapat digunakan untuk program ketahanan pangan berbasis pertanian lokal. Mendorong pemberdayaan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur pertanian sederhana.
4. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 15 Tahun 2021
Tentang: Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan
Isi pokok: Mendorong sinergi antar desa untuk membentuk kawasan ekonomi produktif. Menyasar pengembangan potensi desa melalui kelembagaan kawasan, BUMDes bersama, dan dukungan lintas sektor.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023
Tentang: Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani
Isi pokok: Penguatan kelompok tani dan gapoktan untuk mendukung modernisasi pertanian. Peningkatan kapasitas petani dan fasilitasi akses ke pembiayaan dan pasar.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017
Tentang: Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Isi pokok: Menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan pertanian dan pedesaan berbasis RPJMDes dan RKPDDes. Menekankan pentingnya partisipasi masyarakat desa.
7. Peraturan Bersama Tiga Menteri (Kemendagri, Kementan, Kemendes) Tahun 2017
Tentang: Sinergi Program Pembangunan Pertanian dan Desa
Isi pokok: Kolaborasi antarsektor dalam memperkuat pembangunan kawasan perdesaan berbasis pertanian. Menjadi rujukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tiga Dasar Kebijakan Pembangunan Pertanian dan pedesaan di Indonesia

Dasar kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia terdapat 3 kebijakan yaitu keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan teknologi. Ketiga dasar ini memiliki hubungan yang erat satu sama lain dan merupakan pilar penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara umum.

Pertama, keberlanjutan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian sumber daya alam. Kebijakan yang diarahkan pada pertanian berkelanjutan, seperti program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), bertujuan untuk mencegah alih fungsi lahan yang dapat merugikan sektor pertanian (Dayanti & Soetjipto, 2024). Selain itu, kebijakan yang mengedepankan pertanian ramah lingkungan berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana (Jaya, 2024). Melalui program-program ini, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Restiatun et al., 2023).

Kedua, pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi kebijakan dalam pengembangan pertanian dan pedesaan. Keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan serta pengelolaan hasil pertanian mereka merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan yang berbasis pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan

lokal, serta struktur sosial yang memadai sangat penting dalam memberdayakan petani (Pranadji, 2016). Hal ini tercermin dalam kebijakan subsidi pupuk dan benih tanaman, yang terbukti meningkatkan kesejahteraan petani (Hidayat et al., 2024). Pemberdayaan yang efektif juga mengarah kepada pengembangan agribisnis lokal, yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan (Luhukay, 2011).

Ketiga, pengembangan teknologi dalam pertanian merupakan dasar yang tidak kalah penting. Kebijakan seperti implementasi smart farming bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian melalui pemanfaatan teknologi modern (Rahmanul et al., 2023). Selain itu, pengembangan inovasi dalam sistem dan usaha pertanian dapat menumbuhkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global (Dabukke & Iqbal, 2016). Inovasi juga menjadi kunci dalam meningkatkan akses pasar bagi petani, sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan meminimalisir kemiskinan di desa (Restiatun et al., 2023).

Studi kasus dan implementasi kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia

Secara keseluruhan, keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan teknologi berfungsi sebagai dasar utama dalam kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian tetapi juga untuk menciptakan sistem pertanian yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk memberikan gambaran lebih jelas terkait tiga kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan maka berikut beberapa contoh yang terdapat pada beberapa daerah di Indonesia :

1. Keberlanjutan

Contoh Kasus: Program Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (LP2B)

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian, pemerintah Indonesia meluncurkan program LP2B. Di Kabupaten Bogor, program ini berhasil mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian seperti perumahan dan industri. Dengan menerapkan kebijakan perlindungan lahan, luas lahan yang terjaga mencapai sekitar 3.000 hektar selama periode 2018-2022. Studi yang dilakukan oleh Dayanti dan Soetjipto (2024) menunjukkan bahwa keberadaan LP2B tidak hanya mengurangi alih fungsi lahan, tetapi juga meningkatkan produktivitas pada lahan yang dilindungi hingga 20% melalui penggunaan teknik pertanian berkelanjutan, seperti rotasi tanaman dan penggunaan pupuk organik.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Contoh Kasus: Program Pemberdayaan Petani Melalui Kelompok Tani di Desa Sumberrejo

Di Desa Sumberrejo, Jawa Timur, pemerintah daerah bekerja sama dengan LSM untuk membentuk kelompok tani yang bertujuan untuk memberdayakan petani kecil. Dengan pelatihan yang diberikan, kelompok tani ini berhasil mengelola usaha pertanian secara kolektif, yang terbukti meningkatkan produksi padi sebesar 30% dalam dua tahun. Selain itu, program ini juga memperkenalkan model keuangan mikro yang memungkinkan anggota kelompok tani untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah. Kajian oleh Hidayat et al. (2024) mencatat bahwa melalui program ini, pendapatan petani meningkat secara signifikan, dan mereka mampu mengakses pasar dengan lebih baik, yang pada gilirannya mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan (Hidayat et al., 2024).

3. Pengembangan Teknologi

Contoh Kasus: Implementasi Smart Farming di Kabupaten Sleman

Dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi pertanian, Kabupaten Sleman di DIY menerapkan teknologi smart farming, yang mencakup penggunaan sensor tanah dan sistem irigasi otomatis. Dengan bantuan teknologi ini, petani dapat memantau kondisi tanah dan kebutuhan air secara real-time, yang berdampak positif pada hasil panen. Rahmanul et al. (2023) melaporkan bahwa dengan penerapan teknologi ini, produksi sayuran di Sleman meningkat hingga 40% dibandingkan dengan metode konvensional (Rahmanul et al., 2023). Selain itu, pelatihan tentang penggunaan teknologi baru membantu meningkatkan keterampilan petani, yang selanjutnya meningkatkan nilai jual produk pertanian mereka di pasar lokal dan nasional.

Berdasarkan contoh kasus diatas maka Implementasi kebijakan yang efektif memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani dan masyarakat di pedesaan, dan menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia.

Arah dan Strategi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia

Pembangunan sektor pertanian dan pedesaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim, dinamika pasar, dan kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan. Salah satu upaya signifikan dalam mengatasi tantangan ini adalah melalui strategi pertanian berkelanjutan dan pengembangan ekonomi pedesaan berbasis agroekologi.

1. Revitalisasi ekonomi pedesaan melalui praktik pertanian berkelanjutan dapat menjadi solusi terhadap penurunan produktivitas dan degradasi lingkungan yang terjadi di wilayah tersebut (Arifin et al., 2023). Hal ini juga harus diimbangi dengan langkah-langkah adaptasi terhadap perubahan iklim, yang mencatat pentingnya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim terhadap pertanian di pedesaan (Syahruni, 2023).
2. Mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Djibrin & Mokoginta (2023) menekankan efektivitas model tersebut dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan sosial masyarakat, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan hasil pertanian tetapi juga memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.
3. Pengembangan infrastruktur memiliki peran krusial dalam pertumbuhan sektor pertanian. Pembangunan irigasi, misalnya, terbukti meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani di berbagai daerah (Novizal, 2022). Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan kunci untuk memperkuat keterhubungan petani dengan pasar. Implementasi program penyuluhan dan pembangunan infrastruktur pertanian dari pemerintah juga menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan petani secara keseluruhan (Sudarwati & Nasution, 2024).
4. Pendekatan berbasis masyarakat. Ketidakmerataan dalam pembangunan seringkali menjadi hambatan bagi pengembangan wilayah pedesaan. Penelitian Listyawati et al (2023), menyatakan bahwa untuk mencapai redistribusi yang efektif, strategi pembangunan harus mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan ekologi yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis masyarakat, melalui penggunaan model Asset Based Community Development dan memastikan bahwa pembangunan petani dan masyarakat pedesaan sesuai dengan kebutuhan lokal (Ridhani & Priyadharma, 2023).
5. Perluasan kewirausahaan menjadi strategi untuk ketahanan dan keberlanjutan pembangunan pertanian. Pengembangkan keterampilan kewirausahaan di kalangan petani dapat menciptakan peluang baru yang berkelanjutan, yang sangat penting untuk stabilitas ekonomi pedesaan. Integrasi antara keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi maka kebutuhan masyarakat desa akan dapat terpenuhi secara berkelanjutan (Mubarak et al., 2023),.

Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan di Indonesia

Tantangan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia sangat kompleks dan berhubungan dengan berbagai faktor, mulai dari kesenjangan pendidikan di kalangan petani muda hingga keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan teknologi dalam pertanian. Pemuda cenderung memilih pekerjaan di sektor lain akibat kurangnya kecocokan antara keterampilan yang mereka miliki dengan pekerjaan yang tersedia di sektor pertanian. Penelitian Arvianti et al (2019), menyatakan sebagian besar petani muda di Indonesia enggan terjun ke sektor ini, karena kurangnya keterampilan yang relevan dan kesempatan kerja yang terbatas. Jumlah petani muda usia produktif yang semakin menurun dan jumlah petani tua yang semakin meningkat (Farmia, 2020; Salamah et al., 2021). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (2021), pemuda Indonesia yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 19,18%, jumlah ini terpaut jauh daripada generasi muda yang bekerja pada sektor industri dan jasa secara berurut adalah 25,02% dan 55,80%. Fakta selanjutnya adalah pemuda lulusan perguruan tinggi yang bekerja pada sektor pertanian sebanyak 3,18% sedangkan sektor industri dan jasa sebanyak 11,53% dan 84,66%. Penurunan jumlah petani dan tenaga kerja pertanian menurut Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) disebabkan karena semakin

berkurangnya tingkat keminatan generasi muda dalam menekuni dan mempelajari sektor pertanian (Gulo et al., 2018).

Isu keberlanjutan di sektor pertanian, tantangan modern pertanian tidak lagi hanya mengenai meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi tanpa merusak lingkungan (Hammada, 2024). Ini menunjukkan perlunya kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan yang mampu mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi, seperti yang dibahas oleh Djibrin dan Mokoginta dalam penelitian mereka mengenai model pertanian berkelanjutan di Jawa Tengah (Djibrin & Mokoginta, 2023). Teknologi informasi juga diakui berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, pentingnya akses petani terhadap informasi pasar dan platform digital (Sudarwati & Nasution, 2024).

Tantangan dalam perlindungan lahan pertanian juga menjadi perhatian utama. Perubahan fungsi lahan menjadi perumahan dan industri adalah masalah yang semakin kritis, yang memicu perlunya kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi lahan pertanian yang ada (Heryanto & Nugraha, 2024). Untuk memastikan keberlanjutan di sektor pertanian, perlu ada sinergi antara kebijakan publik dan tindakan di lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan (Arifin et al., 2023).

Dari semua tantangan yang dihadapi, salah satu solusi adalah pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif melalui :

1. Kebijakan yang berbasis lokal. Model kebijakan pemberdayaan di pedesaan perlu dioptimalkan untuk menghadapi tantangan, program dan intervensi dari pemerintah perlu lebih terarah dan inklusif untuk memastikan sektor pertanian dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan (Lestrai & Sunardi, 2024).
2. Integrasi teknologi dan komunikasi menjadi semakin penting untuk mendukung pertanian yang tangguh dan berkelanjutan (Nugroho et.al, 2020)..
3. kontrol terhadap alih fungsi lahan, bisa menjadi bahan informasi bagi pembuat kebijakan dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional (Rostini, 2023).
4. Kolaborasi antara pemangku kepentingan juga menjadi langkah krusial dalam menghadapi tantangan yang ada, untuk kelangsungan sektor pertanian dan perdesaan di Indonesia (Rachman, & Suryani 2021).

Dampak kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat

Dampak kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah isu yang sangat kompleks dan luas. Pembangunan di sektor ini tidak hanya membutuhkan perhatian pada aspek peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan sosial dan penguatan ekonomi pedesaan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor utama pengembangan pertanian yang berkelanjutan adalah penerapan kebijakan yang tepat. Penelitian Adetama et.al (2023), menunjukkan perlunya kebijakan pembangunan pertanian yang rendah karbon untuk meningkatkan keberlanjutan dan produktivitas pertanian di seluruh wilayah di Indonesia dimana hal ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan, dengan adanya peningkatan produktivitas berdampak peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Penelitian Irawansah (2023), mengamati pentingnya kebijakan yang mempertimbangkan lingkungan hidup dalam pembangunan daerah, termasuk kebijakan yang mendukung keberlanjutan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat lokal (kearifan lokal). Hal ini didukung dengan penelitian Djibrin dan Mokoginta (2023), menekankan bahwa pendekatan pertanian berkelanjutan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial agar dapat secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis terhadap pengelolaan Dana Desa juga menunjukkan bahwa pengalokasian yang tidak tepat dapat menghambat pertumbuhan pembangunan daerah dan mengurangi dampak positif yang diharapkan pada kesejahteraan masyarakat, sehingga perlunya integrasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi sangat krusial untuk menjamin efektivitas pembangunan (Jamaluddin et al., 2018). Peran teknologi dan digitalisasi juga tidak boleh diabaikan, tanpa kerangka kebijakan yang holistik, digitalisasi di pedesaan dapat menghadapi hambatan yang mengurangi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

penggunaan teknologi dalam pertanian dapat meningkatkan efisiensi serta daya saing, yang diharapkan mampu meningkatkan penghasilan petani (Sarjito, 2023).

Kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan melalui pengurangan alih fungsi lahan (Dayanti & Soetjipto, 2024). Dengan menjaga lahan pertanian, bukan hanya kualitas tanah yang terjaga tetapi juga keberlanjutan pasokan pangan untuk masyarakat. Di sisi lain, pengembangan instrumen kebijakan melalui desentralisasi diapresiasi oleh studi yang mengungkapkan bahwa desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga dapat menggali potensi ekonomi di wilayah pedesaan (Suriadi et al., 2024).

Penelitian Pranadji (2016), menyatakan bahwa ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan terbukti menjadi tantangan yang memerlukan solusi terintegrasi dimana seiring dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah pedesaan, perlunya kebijakan yang merespons secara sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat pedesaan sehingga pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah relevan dan responsif.

Secara keseluruhan, dampak kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat, serta pemanfaatan teknologi yang tepat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inklusif, diharapkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat meningkat secara signifikan.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di Indonesia harus terintegrasi dengan berlandaskan keberlanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan teknologi agar kesejahteraan meningkat tanpa merusak lingkungan. Investasi infrastruktur seperti irigasi dan jalan desa menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, sementara pemberdayaan yang inklusif, termasuk peran perempuan, mampu memperkuat jaringan sosial-ekonomi pedesaan. Tantangan perubahan iklim menuntut strategi adaptasi yang komprehensif, dan desentralisasi memberi peluang bagi pemerintah daerah merancang kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Secara keseluruhan, keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, pendekatan berbasis kawasan, serta partisipasi masyarakat desa. Kebijakan yang efektif tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk itu, penguatan kelembagaan petani dan ekonomi desa menjadi kunci, disertai transformasi pertanian subsisten menuju agribisnis berbasis kawasan. Inovasi teknologi tepat guna dan pembangunan infrastruktur dasar perlu dipercepat agar akses dan produktivitas meningkat. Di sisi lain, ketahanan pangan dapat diperkuat melalui diversifikasi produk lokal, dukungan pembiayaan dan asuransi pertanian, serta perlindungan ekologi yang berkelanjutan. Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta reformasi akses lahan petani menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pertanian yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan konstruktif dalam penyusunan naskah ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Program Doktoral Pertanian Berkelanjutan Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan serta fasilitas yang sangat berharga selama proses penyusunan naskah ini. Semoga hasil karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B., Hasibuan, A., & Sari, I. (2023). Pendekatan masyarakat dalam kebijakan pertanian:

Mendorong keberlanjutan ekonomi. *Jurnal Kebijakan Pertanian*, 12(3), 45-60.

Adetama, R., & Lestari, L. (2023). Model pembangunan pertanian rendah karbon di Indonesia. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 17(1), 75-90.

Anggraeni, D. (2022). Keberlanjutan di sektor pertanian: Evaluasi dan perspektif kebijakan. *Jurnal Kajian Pertanian*, 20(1), 55-70.

Astuti, M., & Muhammad, R. (2021). Tantangan dan strategi inovasi dalam pertanian digital. *Jurnal Teknologi Digital*, 5(3), 111-126.

Badan Pangan Nasional. (2023). Laporan Tahunan 2023: Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan. Jakarta: Badan Pangan Nasional.

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Pertanian 2020: Profil Pertanian Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bappenas. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Chasanah, R., & Yuliana, D. (2022). Peran teknologi informasi dalam pertanian berkelanjutan. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 10(1), 50-65.

Chavas, J. P., & Nauges, C. (2020). Uncertainty, learning, and technology adoption in agriculture. *Applied Economic Perspectives and Policy*, 42(1), 42–53. <https://doi.org/10.1002/aepp.13003>.

Dayanti, D., & Soetjipto, T. (2024). Alih fungsi lahan dan keberlanjutan pertanian. *Jurnal Sumber Daya Alam*, 15(1), 23-35.

Damayanti, S. (2023). Kebijakan publik dalam pengelolaan lahan pertanian. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 25-40.

Djibrin, I., & Mokoginta, A. (2023). Kebijakan pertanian Indonesia: Strategi untuk keberlanjutan. *Journal of Agricultural Policy Studies*, 18(2), 78-92.

Dewi, R., & Hartanto, J. (2022). Pemberdayaan petani muda dalam menghadapi era digital. *Jurnal Pertanian Masyarakat*, 14(2), 80-95.

Dewi, N., & Rahman, A. (2022). Pemberdayaan perempuan dalam agroekonomi: Tantangan dan peluang. *Jurnal Ilmu Pertanian*, 19(1), 112-128.

Dayanti, D., & Soetjipto, T. (2024). Alih fungsi lahan dan keberlanjutan pertanian. *Jurnal Sumber Daya Alam*, 15(1), 23–35.

Fitri, A., & Usni, U. (2024). Pendekatan pertanian berkelanjutan: Implementasi dan dampaknya. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 3(4), 150-165.

Firmansyah, R., & Setiawan, B. (2022). Sinergi program pemerintah dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Manajemen Pertanian*, 10(1), 85-100.

FAO. (2020). Situasi Pangan dan Pertanian di Indonesia. Food and Agriculture Organization.

Gulo, A., & Setiawan, Y. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi minat generasi muda di sektor pertanian. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 6(2), 203-214.

Hidayat, R., Luhukay, J., & Restiatun, E. (2024). Kebijakan subsidi dan kesejahteraan petani: Analisis dampak program. *Jurnal Ekonomi dan Pertanian*, 9(2), 112-126.

Haryanto, S., & Priyono, M. (2024). Perlindungan lahan pertanian: Kebijakan dan praktik terbaik. *Journal of Land Use Policy*, 12(1), 45-59.

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). (2020). Laporan Tahunan HKTI 2020: Pemuda dan Pertanian. Jakarta: HKTI.

Irawansah, F. (2023). Peran kebijakan lingkungan dalam pembangunan wilayah. *Jurnal Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, 8(1), 95-110.

Jaya, P. (2024). Kebijakan pertanian ramah lingkungan: Tantangan dan peluang. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 11(1), 15-29.

Janah, N. (2017). Dinamika penyempitan lahan pertanian di Indonesia. *Jurnal Geografi dan Lingkungan*, 11(2), 45–56.

Jamaluddin, A., et al. (2018). Pengelolaan dana desa: Dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan. *Journal of Rural Economics*, 19(3), 135-150.

Kementerian PUPR. (2024). Strategi Pembangunan Infrastruktur Pertanian. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kementerian Pertanian. (2023). Pedoman Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian Pertanian.

Lestrai, N., & Sunardi, B. (2024). Model kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dalam pertanian. *Jurnal Pembangunan Desa*, 18(2), 77-90.

Listyawati, F., et al. (2023). Evaluasi kebijakan pembangunan daerah: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(4), 95-108.

Luhukay, J. (2011). Pemberdayaan ekonomi pedesaan melalui agribisnis lokal. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 8(3), 50-65.

Li, J., Pu, W., Liu, Q., & Chang, Q. (2020). The impact of agricultural technology adoption on sustainable agricultural development: A meta-analysis. *Sustainability*, 12(10), 4093. <https://doi.org/10.3390/su12104093>

Marita, A., & Siti, R. (2021). Kebijakan keberlanjutan dalam pertanian: Tinjauan dari aspek sosial dan ekonomi. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 15(2), 40-55.

Nasution, A. (2023). Infrastruktur pedesaan dan dampaknya terhadap pasar. *International Journal of Rural Development*, 14(2), 67-80.

Nugroho, R., & Sutrisno, J. (2020). Partisipasi pemuda dalam pertanian: Tantangan dan strategi. *Jurnal Pertanian Milenial*, 2(1), 5-19.

Nurrokhman, M. (2019). Urbanisasi dan perubahan penggunaan lahan pertanian. *Jurnal Wilayah dan Perencanaan*, 29(3), 215–229.

Pakpahan, E. (2018). Ketahanan pangan: Kebijakan dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 7(2), 30-40.

Purwanto, H., & Sari, Y. (2022). Digitalisasi dalam pertanian: Tantangan dan peluang untuk inovasi. *Jurnal Teknologi Pertanian Berbasis Digital*, 7(2), 67-84.

Purwanto, S., & Sari, D. (2022). Inovasi pertanian dan digitalisasi: Menghadapi tantangan era baru. *Jurnal Teknologi Pertanian Berkelanjutan*, 5(4), 89-102.

Restiatun, E., & Soetjipto, T. (2023). Program perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. *Journal of Environmental Economics*, 15(3), 250-265.

Rachmawati, F. (2022). Kebijakan pengembangan UMKM di sektor pertanian. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 23(1), 90-105.

Rahmanul, F., Nugroho, T., & Anwar, M. (2023). Smart farming sebagai strategi peningkatan produktivitas pertanian berkelanjutan. *Jurnal Inovasi Pertanian*, 5(1), 89–101.

Rohani, A., & Sari, T. (2021). Kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pertanian. *Jurnal Sosial dan Kebijakan Pertanian*, 16(2), 42-56.

Riswan, A. (2020). Regenerasi petani muda: Solusi untuk ketahanan pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 11(1), 65-78.

Rusdiana, S., & Maesya, A. (2018). Analisis adopsi teknologi pertanian di Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(2), 175–186.

Sari, A., & Handayani, D. (2024). Sinergi antar pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian. *Jurnal Kebijakan Pertanian dan Pembangunan*, 20(1), 120-134.

Sopyan, I., & Sidipurnwanty, A. (2024). Multistakeholder approach in rural development policies. *Journal of Cooperative Economics*, 22(1), 23-39.

Sudarwati, E., & Nasution, R. (2024). Keberlanjutan dalam pertanian: Pendekatan lintas disiplin. *Jurnal Interdisipliner Pertanian*, 10(3), 130-144.

Susilowati, S. H. (2016). Fenomena penuaan petani dan kekurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 34(1), 35–55. <https://doi.org/10.21082/fae.v34n1.2016.35-55>

Syahyuti, S. (2021). Petani muda dan teknologi digital: Peluang dan tantangan. *Jurnal Inovasi Sosial*, 10(1), 15–30.

Sarjito, M. (2023). Peran teknologi pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. *Journal of Agricultural Innovation*, 9(4), 100-114.

Syaifullah, A. (2023). Teknologi pertanian dan ketahanan pangan nasional. *Jurnal Pangan dan Gizi*, 27(2), 50-67.

Syahyuti, E. (2021). Petani muda dan teknologi digital: Peluang dan tantangan. *Jurnal Inovasi Sosial*, 10(1), 15-30.

Swastika, N., et al. (2016). Ketersediaan lahan pertanian: Tantangan dan solusi. *Jurnal Geografi dan Sumber Daya Alam*, 10(1), 8-22.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Wahyuni, S., & Rahardjo, T. (2021). Peran petani muda dalam penguatan ketahanan pangan lokal melalui pertanian organik. *Jurnal Petanian Muda*, 8(2), 45-59.

Zulkarnain, M., & Ikhsan, M. (2019). Kebijakan pengelolaan sumber daya alam: Tinjauan

tentang keberlanjutan. *Jurnal Sumber Daya Alam Berkelanjutan*, 4(3), 155-170.

Tanjung, H., & Rahmat, S. (2022). Pertanian berkelanjutan dalam konteks perubahan iklim. *Jurnal Perubahan Iklim dan Pertanian*, 4(2), 78-92.

Wahyu, S., & Jamilah, I. (2023). Kolaborasi antar sektor dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 15(1), 101-115.

Zainal, A., & Murtadho, R. (2024). Peningkatan akses pasar bagi petani lokal: Sebuah studi kasus. *Jurnal Ekonomi Perdesaan*, 21(3), 45-60.